

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban Biro Persidangan II terhadap kinerja atas pelayanan rapat dan tata usaha kepada Badan-Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Persidangan II. Secara umum, pada tahun 2021, Biro Persidangan II telah berhasil mencapai seluruh target indikator kinerja dengan sangat baik dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Pencapaian tersebut dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Biro Persidangan II. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Persidangan II atas kerja keras dan loyalitas yang tinggi, sehingga kerja kita bersama membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Kami berharap laporan kinerja tahun 2021 ini dapat bermanfaat dalam pengukuran kinerja Biro Persidangan II dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro Persidangan II serta Sekretariat Jenderal DPR RI di masa mendatang. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada DPR RI secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2021
Plt. Kepala Biro Persidangan II
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dra. Nurul Faiziah
NIP. 196502201991032002

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Biro Persidangan termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Laporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021 yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran program/kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Selama tahun 2021, Biro Persidangan II telah berhasil melaksanakan pelayanan kepada DPR RI khususnya kepada Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Panitia Khusus. Secara umum capaian sasaran program/kegiatan tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dengan capaian setiap indikator kinerja mencapai 100%, sama baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan dan Mahkamah dan Panitia Khusus	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3.31	-	-
	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	92.50%	93.51%	100%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Persidangan II dengan capaian yang baik, Biro Persidangan II mengelola pagu anggaran sebesar Rp2.303.039.000. Pada tahun 2021, dan dapat merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Persidangan II sebesar Rp2.153.584.100 atau 93.51% dari pagu.

Pada tahun 2021, Biro Persidangan II juga telah memberikan pencapaian yang luar biasa, yaitu Biro Persidangan berhasil melaksanakan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dengan baik, sehingga dianugerahkan penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penghargaan ini akhirnya dapat diraih oleh Biro Persidangan II, setelah sebelumnya selama 4 tahun berusaha dan berjuang dalam pelaksanaan ZI.

Dengan demikian, Biro Persidangan II telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan sasaran strategis serta disertai dengan realisasi kinerja anggaran yang sesuai dengan pencapaian kinerja.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
EXECUTIVE SUMMARY	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	7
B. Tugas dan Fungsi	8
C. Struktur Organisasi	9
D. Sumber Daya Manusia	12
E. Potensi dan Tantangan	15
F. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERJANJIAN KINERJA	17
A. Perjanjian Kinerja	18
B. Alokasi Anggaran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Analisis Capaian Kinerja	21
B. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV CAPAIAN <i>OUTPUT</i> BIRO PERSIDANGAN II	25
A. Biro Persidangan II	26
B. Bagian Sekretariat Badan Legislasi	29
C. Bagian Sekretariat Badan Anggaran	32
D. Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	45
E. Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	46
F. Bagian Sekretariat Panitia Khusus	49
G. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Biro Persidangan II -----	12
Gambar 2	Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Umur-----	12
Gambar 3	Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	13
Gambar 4	Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Golongan-----	13
Gambar 5	Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Kelompok Jabatan-----	14
Gambar 6	Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Kelas Jabatan/ <i>Grade</i> -----	14
Gambar 7	Penghargaan Biro Persidangan II Sebagai unit WBK -----	27
Gambar 8	Tampilan Aplikasi PIM DPR RI -----	28
Gambar 9	Tampilan Aplikasi SI Cavid DPR RI -----	28
Gambar 10	Survei Kepuasan Pelayanan Lingkup Biro Persidangan II-----	29
Gambar 11	<i>Screenshot Output</i> Kesimpulan Rapat Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan RKP TA 2022 -----	36
Gambar 12	<i>Screenshot Output</i> Kesimpulan Rapat Siklus Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2021 -----	37
Gambar 13	<i>Screenshot Output</i> Kesimpulan Rapat Siklus Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 -----	39
Gambar 14	<i>Screenshot Output</i> Laporan Pimpinan Badan Anggaran di Paripurna terkait Hasil Pembicaraan Tk. I RUU tentang APBN TA 2022 -----	42
Gambar 15	<i>Screenshot Output</i> Laporan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Badan Anggaran Tahun 2021 -----	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021 -----	18
Tabel 2	Anggaran Biro Persidangan II Tahun 2021 -----	19
Tabel 3	Capaian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021 -----	21
Tabel 4	Realisasi Anggaran Biro Persidangan II Tahun 2021 -----	24
Tabel 5	Rekapitulasi Rapat Baleg Tahun 2021 -----	30
Tabel 6	Rekapitulasi <i>Output</i> Sekretariat Badan Legislasi Pada Tahun 2021 -----	31
Tabel 7	Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan Baleg -----	32
Tabel 8	Akuntabilitas Kinerja Bagian Set. Banggar Tahun 2021 -----	44
Tabel 9	Rekapitulasi Rapat BURT Per Masa Sidang Tahun 2021 -----	45
Tabel 10	Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan BURT -----	46
Tabel 11	Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat BURT ----	46
Tabel 12	Rekapitulasi Kunker BURT dalam Negeri per Masa Sidang Tahun 2021 -----	46
Tabel 13	Rekapitulasi Kegiatan dan Rapat/Sidang MKD -----	48
Tabel 14	Akuntabilitas Kinerja Bagian Set. MKD Tahun 2021 -----	48
Tabel 15	Rekapitulasi Rapat Pansus -----	51
Tabel 16	Rekapitulasi Materi Persidangan Pansus dan Dokumen Administrasi tata usaha Panitia Khusus -----	51
Tabel 17	Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat Pansus ----	52
Tabel 18	Akuntabilitas Kinerja Bagian Set. BAKN Tahun 2021 -----	57



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

A. LATAR BELAKANG

DPR RI yang berperan sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1). Lebih lanjut, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (2).

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR RI tersebut, maka ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan Perpres dimaksud Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Sekretaris Jenderal merupakan koordinator, Pembina, dan pengambil kebijakan dalam lingkungan Setjen DPR RI. Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Setjen DPR RI, Sekretaris Jenderal dibantu oleh dua deputy yang memiliki tugas berbeda, dan masing-masing membawahi biro-biro. Salah satu deputy yaitu Deputy Bidang Persidangan, yang membawahi Biro Persidangan II.

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI Pasal 65, Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada badan, mahkamah, dan panitia DPR RI. Lebih lanjut, pada Pasal 67 disebutkan bahwa Biro Persidangan II terdiri atas Bagian Sekretariat Badan Legislasi, Bagian Sekretariat Badan Anggaran, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga, dan Bagian Sekretariat Panitia Khusus.





Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan II selalu mengacu pada berbagai peraturan seperti Perpres Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di lingkungan Biro Persidangan II. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Persidangan II merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang Religius, Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas. Laporan Kinerja ini juga merupakan sarana komunikasi Biro Persidangan II kepada seluruh *stakeholder*. Seluruh saran dan kritik yang akan disampaikan terkait penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kerja di masa mendatang.

B. TUGAS DAN FUNGSI



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada badan, mahkamah, dan panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Persidangan II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Persidangan II;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
3. Pelaksanaan rapat di badan, mahkamah, dan panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Pelaksanaan administrasi persidangan di badan, mahkamah, dan panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II; dan

6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, struktur organisasi Biro Persidangan II berada di bawah Deputi Bidang Persidangan dan terdiri atas:

1. Kepala Biro Persidangan II;
2. Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Legislasi; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Legislasi.

Bagian Sekretariat Badan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Legislasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Legislasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Legislasi;
- d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Legislasi; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.

3. Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran, terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Anggaran.

Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Anggaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Anggaran;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Anggaran;
- d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Anggaran; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.



- 
4. Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, terdiri atas;
 - a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.

5. Kepala Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, terdiri atas;
 - a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
 - c. Kepala Subbagian Administrasi Perkara Mahkamah Kehormatan Dewan.



Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan serta administrasi perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan;



- d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan;
 - e. Pelaksanaan dukungan administrasi dan penyiapan bahan verifikasi dan bahan penyelidikan perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.
6. Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga terdiri atas;
- a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga.

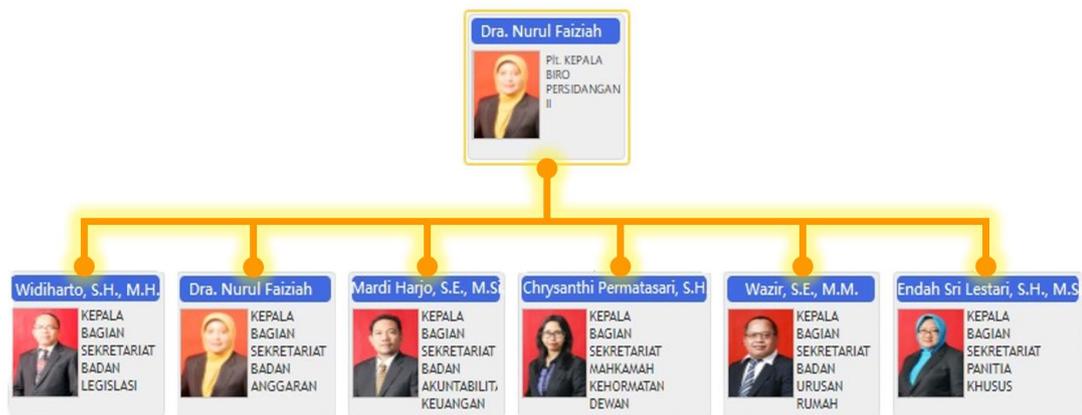
Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Urusan Rumah Tangga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga;
 - b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Urusan Rumah Tangga;
 - d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Urusan Rumah Tangga; dan
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.
7. Kepala Bagian Sekretariat Panitia Khusus, terdiri atas:
- a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Panitia Khusus; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Panitia Khusus.

Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Panitia Khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Panitia Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Panitia Khusus;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Panitia Khusus;
- d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Panitia Khusus; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.

Struktur organisasi Biro Persidangan II dapat dilihat pada gambar 1.



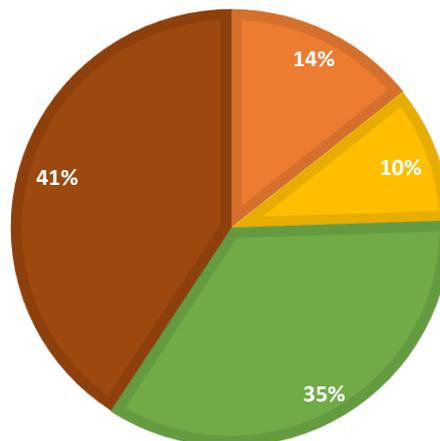
Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan II

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Biro Persidangan II mempunyai SDM, baik SDM struktural maupun SDM fungsional. Berdasarkan rentang usia, Biro Persidangan II didominasi karyawan dengan rentang umur ≥ 51 tahun sebanyak 20 orang dan disusul oleh karyawan di rentang umur 41-50 tahun sebanyak 17 orang. Di urutan terbanyak ketiga yaitu karyawan dengan rentang umur ≤ 30 tahun sebanyak 7 orang, dan untuk rentang umur 31-40 tahun sebanyak 5 orang sebagaimana diagram di bawah ini.

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II BERDASARKAN UMUR

■ ≤ 30 tahun ■ 31-40 tahun ■ 41-50 tahun ■ ≥ 51 tahun

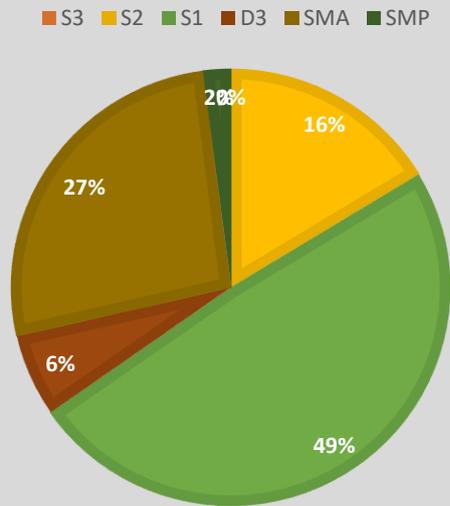


Gambar 2. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Umur

Berdasarkan tingkat pendidikan, Biro Persidangan II diisi oleh tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 8 orang; Strata 1 (S1) sebanyak 24 orang; Diploma III (D3) sebanyak 3 orang; SMA sebanyak 13 orang; dan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang.



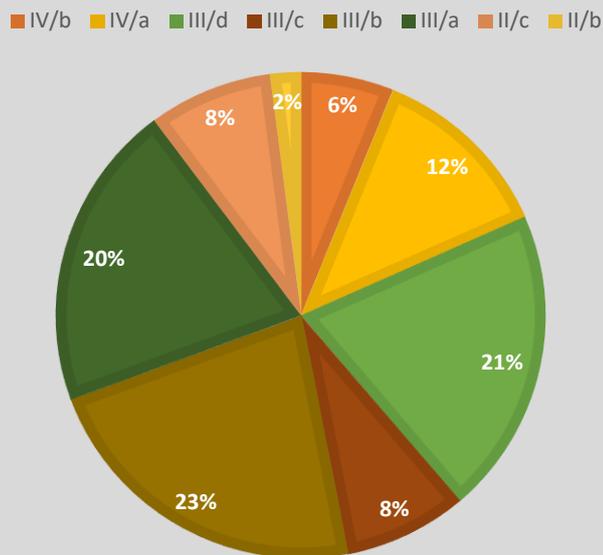
KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Gambar 3. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan golongan, SDM Biro Persidangan II golongan IV/b sebanyak 3 orang; golongan IV/a sebanyak 6 orang; golongan III/d sebanyak 10 orang; golongan III/c sebanyak 4 orang; golongan III/b sebanyak 11 orang; golongan III/a sebanyak 10 orang; golongan II/c sebanyak 4 orang; dan golongan II/b sebanyak 1 orang.

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II BERDASARKAN GOLONGAN

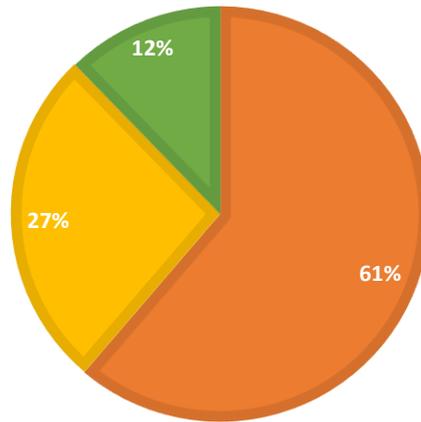


Gambar 4. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Golongan

Berdasarkan jabatan, SDM di lingkungan Biro Persidangan II terdiri dari jabatan pelaksana sebanyak 30 orang, jabatan pejabat pengawas sebanyak 13 orang, dan jabatan pejabat administrator sebanyak 6 orang.

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

■ Pelaksana ■ Pejabat Pengawas ■ Pejabat Administrator

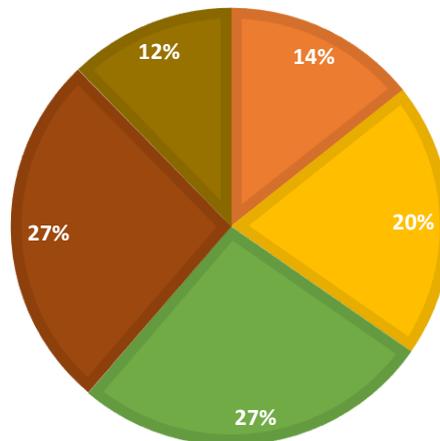


Gambar 5. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Kelompok Jabatan

Berdasarkan kelas jabatan, SDM di lingkungan Biro Persidangan II terdiri dari 6 orang *grade* 13; 13 orang *grade* 10; 13 orang *grade* 7; 10 orang *grade* 6; dan 7 orang *grade* 5, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II BERDASARKAN KELAS JABATAN/GRADE

■ Grade 5 ■ Grade 6 ■ Grade 7 ■ Grade 10 ■ Grade 13



Gambar 6. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Kelas Jabatan/Grade

Jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas dukungan persidangan dan rapat-rapat Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus, serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, SDM yang dimiliki oleh Biro Persidangan II dari segi jumlah maupun tingkat pendidikan masih belum optimal.



E. POTENSI DAN TANTANGAN

1. Potensi

Potensi yang dimiliki oleh Biro Persidangan II, antara lain:

- a. Penerapan sistem informasi penyusunan undang-undang (Sileg) yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penerapan *e-office* dalam mendukung pelaksanaan pelayanan rapat dan administrasi kepada Anggota DPR RI.
- b. Hubungan dengan pihak luar/Mitra Kerja yang dapat dikatakan baik, sehingga dapat mempermudah dan melancarkan komunikasi serta koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dewan.

2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Biro Persidangan II, antara lain:

- a. Jadwal rapat-rapat DPR RI yang sering berubah sangat cepat, dikarenakan Adanya dinamika politik DPR RI yang sangat besar, sehingga juga dapat berimplikasi pada pembahasan kebijakan terkait dengan program/kegiatan Setjen DPR RI, khususnya Biro Persidangan II, hal ini tentunya akan berdampak terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. Jumlah SDM yang tersedia belum sebanding dengan volume dan ritme kerja tugas dan fungsi konstitusional DPR RI, jumlah pegawai yang ada belum memenuhi kebutuhan Analisa beban kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi;
- c. Kapasitas dan kapabilitas SDM belum optimal;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana ruang kerja;
- e. Kemampuan SDM mengoperasikan sarana dan prasarana pendukung kerja belum optimal;
- f. Budaya kerja yang belum optimal dalam memberikan pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR RI.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Persidangan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan



Bagian ini menjelaskan hal-hal umum terkait Biro Persidangan II, uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, potensi dan tantangan yang dihadapi, serta sistematikan penyajian laporan.

2. Perjanjian Kinerja

Bagian ini menjelaskan mengenai Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 atas Biro Persidangan II

3. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menjelaskan uraian pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan.

4. Capaian *Output* Biro Persidangan II

Bagian ini menjelaskan capaian/keberhasilan *outcome/output* Biro Persidangan II selama tahun 2021.

5. Penutup





BAB II

PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERJANJIAN KINERJA



Perjanjian Kinerja merupakan dasar pelaksanaan kinerja Biro Persidangan II, Perjanjian Kinerja disusun agar pelaksanaan kinerja dalam Biro Persidangan II dapat lebih terarah. Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian kinerja pada Biro Persidangan II sudah diperjanjikan secara berjenjang mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, sampai kepada level Pelaksana.

A. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Perjanjian Kinerja untuk tingkat unit kerja Biro, Pusat, dan Inspektorat, khususnya pada Biro Persidangan II telah disusun dengan sasaran dan indikator yang berorientasi pada *outcome*. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kemenpan RB yang mengemukakan bahwa kinerja dari unit Eselon II harus dapat memberikan *impact* bagi organisasi. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II disampaikan pada tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan dan Mahkamah dan Panitia Khusus	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI	100%
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3.31
	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	92.50%

Sumber : Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021

B. ALOKASI ANGGARAN

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan memerlukan pembiayaan yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI Tahun 2021. Alokasi anggaran Biro Persidangan II pada tahun 2021 sebesar Rp2.303.039.000 yang dialokasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Biro Persidangan II Tahun 2021

No	Unit Kerja	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Biro Persidangan II	1.677.855.000	1.205.103.000
2	Bagian Sekretariat Badan Legislasi	269.459.000	269.459.000
3	Bagian Sekretariat Badan Anggaran	25.080.000	65.580.000
4	Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	306.592.000	195.742.000
5	Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	140.430.000	96.432.000
6	Bagian Sekretariat Panitia Khusus	151.494.000	151.494.000
7	Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	350.729.000	319.229.000
Total		2.921.639.000	2.303.039.000

Sumber : DIPA TA 2021

Pada tahun 2021 Biro Persidangan II melakukan penghematan anggaran (realokasi) dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penghematan (realokasi) di Biro Persidangan Sebagian besar berasal dari kegiatan anggaran perjalanan dinas dan jamuan rapat sebesar Rp618.600.000,-, sehingga anggaran yang dikelola oleh Biro Persidangan II yang semula Rp2.921.639.000,- menjadi Rp2.303.039.000,- .



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II tahun 2021, metode yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan Biro Persidangan II. Data kinerja yang dikumpulkan adalah rincian capaian kinerja berupa *outcome* dan *output* kegiatan serta realisasi anggaran dan informasi lainnya terkait capaian kinerja yang dilakukan oleh jajaran Biro Persidangan II pada tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan lengkap serta tepat waktu dan konsisten, sehingga berguna sebagai referensi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja di lingkungan Biro Persidangan II tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektifitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan atau diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dengan tujuan melihat perkembangan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2021, terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dengan terbitnya Peraturan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun Biro Persidangan II tidak mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan struktur organisasi lama, sehingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja Biro Persidangan II tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan pada tahun 2020, yaitu dengan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Capaian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%
Badan dan Mahkamah dan Panitia Khusus	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3.31	-
	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	92.50%	93.51%

Ketiga indikator tersebut mencerminkan tugas dan fungsi Biro Persidangan II serta unit di bawahnya sebagai upaya menjalankan wewenangnya sebagai pemberian pelayanan kepada badan, mahkamah, dan panitia khusus.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kepala Biro Persidangan II mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Persidangan II. Pada tahun 2021 Biro Persidangan II mampu menyelesaikan semua indikator kinerja nya dengan baik dan dicapai sesuai target. Uraian capaian Kinerja tiap indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1: Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%	100%

Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI dimaksudkan untuk mengukur pemberian layanan oleh Biro Persidangan II secara lengkap sesuai peraturan dan sesuai SOP yang berlaku.

Indikator ini merupakan akumulasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian-Bagian di jajaran Biro Persidangan II, pelaksanaan pemberian layanan selama satu tahun yang dilakukan unit bagian sangatlah penting karena pelayanan yang dilakukan salah satunya adalah penyediaan bahan-bahan rapat seperti skenario dan laporan singkat kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus, oleh karena itu seluruh kegiatan pelayanan kedewanan yang dilakukan haruslah terlaksana, sehingga pencapaian *output* unit bagian dihasilkan secara sempurna.

Dengan demikian pencapaian tersebut, maka **indikator kinerja pertama** Biro Persidangan II, yaitu **persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI dengan target sebesar 100% telah dapat tercapai 100%**

2. Indikator Kinerja 2: Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3.31	-	-



Survei dilakukan pada bulan November dan Desember 2021, kepada Anggota DPR RI. Namun sampai dengan Januari 2022, pelaksanaan survei tahun 2021 masih dalam proses, sehingga realisasi Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan belum dapat diketahui.

Oleh karena itu, untuk sementara sampai hasil survei tahun 2021 telah selesai, hasil survei tahun 2021 akan memakai hasil survei pada tahun 2020, di tahun 2020 survei dilakukan pada dua unsur penilaian atas kinerja Layanan Persidangan yaitu waktu penyelesaian dan produk spesifikasi jenis pelayanan. Adapun hasil survei sebagai berikut:

- a. Waktu Penyelesaian
- b. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil survei pada tahun 2020 sebesar **3.305** atau sebanyak **82,629%** masuk dalam kategori “**Baik**”, pada tahun 2020 pencapaian hasil survei kepuasan atas layanan persidangan mencapai 100%. Oleh karena itu Biro Persidangan II optimis pada tahun 2021 akan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga target pada tahun 2021 di naikan menjadi 3.31. Dengan kenaikan nilai indikator tersebut maka dalam pencapaian **indikator kinerja kedua** Biro Persidangan II, yaitu **Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan dengan target sebesar 3.31, Biro Persidangan Optimis akan memperoleh pencapaian sebesar 100% seperti pada tahun sebelumnya.**

3. Indikator Kinerja 3: Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	92.50%	93.51%	100%

Biro Persidangan II mengelola pagu anggaran sebesar Rp2.303.039.000 anggaran tersebut dapat merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan dilingkungan Biro Persidangan II sebesar Rp2.153.584.100 atau 93.51% dari pagu.

Dengan pencapaian tersebut maka **indikator kinerja ke tiga** Biro Persidangan II yaitu **Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II dengan target 92.50% telah dapat tercapai 100%**

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Biro Persidangan II pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.303.039.000. Pagu anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.153.584.100 atau 93.51% dari pagu, dengan rincian realisasi Biro Persidangan II seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Biro Persidangan II Tahun 2021

Unit	Pagu	Realisasi	%
Biro Persidangan II	1.205.103.000	1.135.601.600	94,23
Bagian Sekretariat Badan Legislasi	269.459.000	216.252.500	80,25
Bagian Sekretariat Badan Anggaran	65.580.000	65.230.000	99,47
Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	195.742.000	195.619.500	99,94
Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	96.432.000	76.900.000	79,75
Bagian Sekretariat Panitia Khusus	151.494.000	147.582.500	97,42
Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	319.229.000	316.398.000	99,11
Total	2.303.039.000	2.153.584.100	93,51

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat unit yang tidak dapat merealisasikan anggarannya secara optimal adalah Bagian Sekretariat Badan Legislasi sebesar 80,25% dan Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan sebesar 79,75%. Hal ini disebabkan penyebaran pandemi covid-19 yang semakin meluas pada semester I tahun 2021 dan padatnya kegiatan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sehingga banyak kegiatan Sekretariat MKD tertunda, sementara itu untuk realisasi anggaran Sekretariat Badan Legislasi tidak dapat terealisasi dengan optimal karena terdapat matriks tim kerja terkait pembatasan jumlah tim kerja dalam waktu bersamaan, sehingga anggaran tim kegiatan kurang dapat terealisasi dengan optimal.

Namun, seperti yang sudah dijelaskan pada pencapaian indikator ke tiga Biro Persidangan II, dari sisi anggaran pencapaian Biro Persidangan II telah mampu memanfaatkan anggarannya dengan efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung kegiatan badan, mahkamah, dan panitia khusus, realisasi Biro Persidangan II telah melewati dari target realisasi yang ditetapkan. Realisasi anggaran sebesar 93,51% dirasa telah selaras dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan besaran deviasi antara realisasi *output* dengan realisasi anggaran tidak melebihi 20%.

Dengan demikian, Biro Persidangan II telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta disertai dengan realisasi kinerja anggaran yang sesuai dengan pencapaian kinerja



BAB IV

CAPAIAN *OUTPUT* BIRO PERSIDANGAN II

BAB IV CAPAIAN *OUTPUT* BIRO PERSIDANGAN II



Pada pelaksanaan pencapaian tiga indikator kinerja Biro Persidangan II telah melakukan berbagai macam kegiatan, baik di dalam maupun di luar kantor, yang diwujudkan dalam dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rangka mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

A. BIRO PERSIDANGAN II

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Persidangan II

Berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 dan anggaran yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Biro Persidangan II. RKA disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan memperhatikan langkah-langkah strategis yang diperkirakan dapat membuat proses kerja lebih efisien dan efektif.

2. Laporan Kinerja (LKj) Biro Persidangan II

LKj merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat sebagai langkah untuk mengukur capaian Kinerja Biro Persidangan II. LKj menunjukkan hasil kerja yang saling bersinergi dan berintegrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam menjawab tuntutan penyelesaian tugas yang diemban Biro Persidangan II.

3. Kebijakan-kebijakan Biro Persidangan II

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Biro Persidangan II, misalnya ketentuan penyusunan perencanaan program dan anggaran, ketentuan terkait penyelenggaraan rapat di badan, mahkamah, dan panitia khusus, dan SK pengangkatan PPNASN di lingkungan Biro Persidangan II.

4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI) Biro Persidangan II

Zona Integritas ini merupakan salah satu kewajiban Kementerian/Lembaga dalam rangka pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas yang Dicerminkan melalui pelaksanaan ke 6 (enam) area perubahan Zona Integritas. Dalam pelaksanaan Zona Integritas, Biro Persidangan II melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Biro Persidangan II memulai pelaksanaan ZI pada tahun 2021 pada tanggal 15 Januari 2021 dengan ditetapkannya Biro Persidangan II sebagai unit kerja pembangunan ZI.
- b. Dalam pelaksanaannya Biro Persidangan II melakukan Submit LKE ZI ke KemenPANRB pada tanggal 30 Juli 2021, yang pelaksanaannya melalui Inspektorat Utama sebagai unit pendamping ZI.

- c. Pada tanggal 10-21 Oktober 2021 KemenPANRB melaksanakan survei ZI terhadap pengguna layanan Biro Persidangan II, dan Biro Persidangan dinilai lolos survei untuk kemudian dilanjutkan kegiatan evaluasi lapangan.
- d. Pada tanggal 10 November 2021 KemenPANRB melaksanakan evaluasi lapangan terkait pelaksanaan ZI Biro Persidangan II.
- e. Pada 20 Desember 2021 Biro Persidangan II ditetapkan dan dianugerahkan predikat WBK oleh KemenPANRB.

Pada Tahun 2021 setelah melewati atau mencoba pelaksanaan ZI selama 3 tahun, akhirnya di tahun ke 4, Biro Persidangan II telah sukses untuk selalu melakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan di 6 area Zona Integritas dan **dianugerahkan oleh Kementerian PANRB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).**



Gambar 7. Penghargaan Biro Persidangan II sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

5. Inovasi Biro Persidangan II

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, pada tahun 2021 Biro Persidangan mengembangkan inovasi-inovasi yang sangat berguna dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melayani kegiatan DPR RI, inovasi-inovasi tersebut meliputi:

a. *Personal Information for Member (PIM DPR RI)*

Aplikasi PIM DPR RI berupa inovasi teknologi informasi yang berisikan informasi data kegiatan Anggota DPR RI berikut bahan/materi secara digital kepada Anggota DPR RI guna mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Pembuatan aplikasi ini dilaksanakan oleh Biro Persidangan II untuk mendukung program DPR RI menjadi parlemen modern dengan pencanangan program *e-Parliament* DPR RI pada tanggal 8 Oktober 2020.



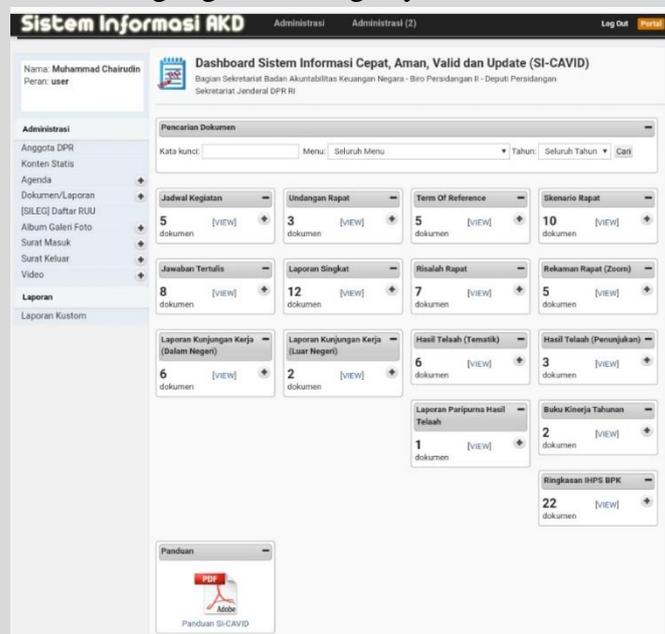
Aplikasi PIM DPR RI ini, diharapkan Anggota DPR RI dapat dengan cepat memperoleh data dan informasi secara cepat, lengkap, efektif, dan efisien sehingga dapat membuat keputusan-keputusan strategis dalam tugas dan fungsinya



Gambar 8. Tampilan Aplikasi PIM DPR RI

b. Sistem Informasi Cepat, Aman, Valid dan Update (SI CAVID)

Aplikasi SI CAVID berupa teknologi informasi yang digunakan untuk penyampaian bahan/materi rapat kepada Anggota DPR RI dengan cepat, aman, valid dan update secara *online* yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan keamanan yang baik guna mendukung tugas dan fungsinya.



Gambar 9. Tampilan Aplikasi SI CAVID DPR RI

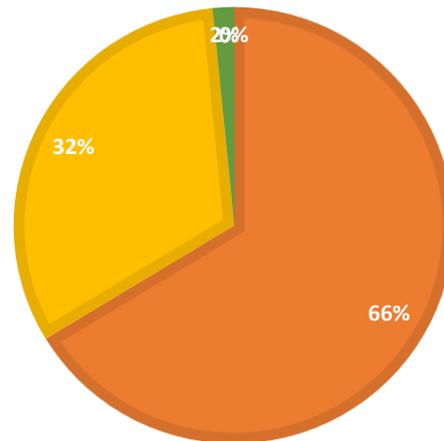
6. Survei Kepuasan Pelayanan lingkup Biro Persidangan II

Selain survei kelembagaan untuk mencapai indikator kinerja, Biro Persidangan II juga melaksanakan survei internal terkait kepuasan pelanggan atas pelayanan yang dilakukan oleh Biro Persidangan II.

Survei dilakukan secara sederhana kepada 30 Responden Anggota DPR RI yang merupakan Anggota Badan-badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus dan responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner sebanyak 28 responden, dari survei sederhana tersebut dihasilkan sebagai berikut:

SURVEI KEPUASAN PELAYANAN LINGKUP BIRO PERSIDANGAN II

■ Sangat Puas ■ Puas ■ Kurang Puas ■ Tidak Puas



Gambar 10. Survei Kepuasan Pelayanan Lingkup Biro Persidangan II

- Sebanyak 66.32% Responden menyatakan Sangat Puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Persidangan II
- Sebanyak 32.14% Responden menyatakan Puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Persidangan II
- Sebanyak 1.54% Responden menyatakan Kurang Puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Persidangan II
- Sebanyak 0.00% Responden menyatakan Tidak Puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Persidangan II

B. BAGIAN SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI

Capaian kinerja Bagian Sekretariat Badan Legislasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Jumlah Materi Persidangan Badan Legislasi (Baleg)		
Target	Realisasi	Capaian
5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Yang dimaksud dengan Jumlah Materi Persidangan Badan Legislasi (Baleg) adalah jumlah materi yang berupa dukungan teknis dan administrasi serta persidangan yang disiapkan oleh Bagian Sekretariat Baleg, yaitu dokumen yang diperlukan dan digunakan dalam



penyelenggaraan rapat-rapat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Adapun materi persidangan yang disiapkan oleh Bagian Sekretariat Baleg adalah berupa kelengkapan penyelenggaraan rapat, yaitu jadwal acara rapat, surat undangan rapat, skenario rapat, daftar hadir rapat, rekapitulasi daftar hadir rapat, pointers rapat, dan penyiapan bahan rapat, seperti dokumen substansi rapat, *draft* kesimpulan rapat, catatan rapat, dan laporan singkat.

Selain itu, Bagian Sekretariat Baleg juga menyiapkan laporan kunjungan kerja, baik kunjungan dalam negeri maupun luar negeri; menyiapkan laporan kinerja, dan melakukan administrasi surat-surat, baik surat masuk maupun surat keluar, serta melakukan administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, yang meliputi: jamuan rapat, rapat konsinyering, Surat Perjalanan Dinas (SPD) kunjungan kerja; honorarium narasumber, pencetakan dan penjilidan, revisi anggaran, dan laporan realisasi anggaran.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Bagian Sekretariat Baleg telah memberikan dukungan kegiatan kepada Baleg dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib jo. Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun kegiatan/rapat-rapat yang telah dilaksanakan oleh Baleg sebanyak 96 (sembilan puluh enam) rapat sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Rapat Baleg Tahun 2021

NO	MASA SIDANG	BULAN												JUMLAH PER MASA SIDANG
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS III	5	2											7
2	MS IV			11	6									17
3	MS V					7	5	6						18
4	MS I								5	15	8			28
5	MS II											15	11	26
	JUMLAH PER BULAN	5	2	11	6	7	5	6	5	15	8	15	11	96

Berdasarkan kegiatan rapat-rapat Baleg tersebut, capaian kinerja Sekretariat Baleg pada Tahun 2021, yaitu tercapai sebanyak 5 dokumen Materi Persidangan Baleg yang telah dilakukan dalam 5 Masa Persidangan, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan dan penyempurnaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021; penyusunan RUU yang disiapkan oleh Badan Legislasi; pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU usulan Komisi dan Anggota DPR; Pembahasan RUU yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU;

penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Terlampir capaian output yang telah diselesaikan oleh Sekretariat Badan Legislasi pada Tahun 2021.

Tabel 6. Rekapitulasi Output Sekretariat Badan Legislasi pada Tahun 2021

1. Laporan Materi Prolegnas	3
❖ Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (selesai disusun Baleg tgl 15 September 2021)	
❖ Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (selesai dievaluasi di Baleg tgl 15 September 2021)	
❖ perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2022	
2. Laporan Materi Penyusunan RUU Usul Baleg	6
❖ RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. (selesai penyusunan tgl 14 Juni 2021)	
❖ RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. (selesai penyusunan tgl 14 Juni 2021)	
❖ RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. (selesai penyusunan tgl 14 Juni 2021)	
❖ Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran (selesai penyusunan tgl 29 Sept 2021)	
❖ RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selesai penyusunan tgl 8 Desember 2021)	
❖ Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol (belum dapat diselesaikan penyusunannya)	
3. Laporan Materi Harmonisasi RUU	13
❖ RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	
❖ RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	
❖ RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional.	
❖ 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan (selesai harmonisasi)	
❖ Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (belum selesai)	
❖ Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (belum selesai)	
❖ Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (belum selesai)	
4. Laporan Materi Pembahasan RUU	3
❖ RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl 7 Desember 2021)	
❖ RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi	



Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl 7 Desember 2021)	
❖ RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl 7 Desember 2021)	
5. Laporan Pemantauan dan Peninjauan UU	1
❖ UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Selesai di Badan Legislasi tgl 5 Juli 2021)	
6. Laporan Materi Penyusunan Peraturan DPR RI	1
❖ Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selesai penyusunan dan pembahasan di Baleg tgl 9 Desember 2021)	

Tabel 7. Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan Baleg

Kegiatan	Jumlah Rapat	Target (dok.)	Realisasi (dok.)	Capaian	
				Kuantitatif	Kualitatif
1. MP III	7	1	1	100 %	100 %
2. MP IV	17	1	1	100 %	100 %
3. MP V	18	1	1	100 %	100 %
4. MP I	28	1	1	100 %	100 %
5. MP II	26	1	1	100 %	100 %
Jumlah	96	5	5	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel 7 tersebut di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Bagian Sekretariat Badan Legislasi telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kinerja Bagian Sekretariat mencapai target, yaitu mencapai 5 dokumen dari 5 dokumen yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sehingga capaian kerjanya tercapai 100 % baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

C. BAGIAN SEKRETARIAT BADAN ANGGARAN

Bagian Set. Banggar telah menyelesaikan keseluruhan target tersebut secara tepat waktu. Adapun dokumen yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 April 2021. Badan Anggaran DPR RI melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI	Selasa, 18 Mei 2021	Membahas Program kerja Badan Anggaran pada Masa

			Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021
2	Rapat Koordinasi Pimpinan, Tenaga Ahli dan Sekretariat Badan Anggaran DPR RI	Senin, 24 Mei 2021	Persiapan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
3	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022	Senin, 31 Mei 2021	- Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA. 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah TA. 2022 - Pembentukan Panja-Panja
4	Rapat Koordinasi Sekretariat Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian dan Lembaga serta Bank Indonesia	Jumat, 4 Juni 2021	Koordinasi terkait Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
5	Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Rabu, 9 Juni 2021	Membahas Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022
6	Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Kamis, 10 Juni 2021	Membahas Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022
7	Rapat Koordinasi Sekretariat Badan Anggaran DPR RI dengan	Jumat, 11 Juni 2021	Koordinasi terkait Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan Rencana



	Kementerian dan Lembaga serta Bank Indonesia		Kerja Pemerintah Tahun 2022
8	Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Senin, 14 Juni 2021	Membahas Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022
9	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi	Senin, 14 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none">- Membahas RKA K/L Kemenko-Kemenko dalam RAPBN TA. 2022- Rencana Kerja K/L Tahun 2022
10	Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Selasa, 15 Juni 2021	Membahas Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022
11	Rapat Panja Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun 2022	Rabu, 16 Juni 2021	Membahas Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun 2022 dalam RAPBN 2022
12	Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA.	Kamis, 17 Juni 2021	Membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2022

	2022 dan RKP Tahun 2022		
13	Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Senin, 21 Juni 2021	Membahas Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN 2022
14	Rapat Koordinasi Sekretariat Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian dan Lembaga serta Bank Indonesia	Rabu, 22 Juni 2021	Rapat Koordinasi terkait Persiapan Laporan Panja-Panja
15	Rapat Timus Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Rabu, 23 Juni 2021	Penyusunan Laporan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022
16	Rapat Timus Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun Anggaran 2022 Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Rabu, 23 Juni 2021	Penyusunan Laporan Panja Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun 2022 dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022
17	Rapat Timus Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Kamis, 24 Juni 2021	Penyusunan Laporan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022
18	Rapat Timus Kebijakan	Kamis, 24	Penyusunan Laporan Panja



	Transfer ke Daerah dan Dana Desa Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Juni 2021	Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022
19	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022	Rabu, 30 Juni 2021	Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan RKP Tahun 2022



Gambar 11. Screenshot Output Kesimpulan Rapat Siklus Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

2. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Siklus Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA. 2021

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat

Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 April 2021. Badan Anggaran DPR RI melakukan pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA. 2021, dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA. 2021	Senin, 12 Juli 2021	- Penyampaian Pokok-Pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA. 2021 - Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA. 2021 - Pembentukan Panja Perumus Kesimpulan
2	Rapat Panja Perumus Kesimpulan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA. 2021	Senin, 12 Juli 2021	Pembahasan Materi Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA. 2021
3	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA. 2021	Senin, 12 Juli 2021	Laporan dan Pengesahan Hasil Pembahasan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA. 2021



Gambar 12. Screenshot Output Kesimpulan Rapat Siklus Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA. 2021

3. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Siklus Pembahasan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA. 2020

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Juli 2021. Badan Anggaran DPR RI melakukan pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2020, dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1.	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI	Rabu, 18 Agustus 2021	Persiapan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 dan RUU APBN TA 2022
2.	Rapat Koordinasi Pimpinan, Tenaga Ahli dan Sekretariat Badan Anggaran DPR RI	Senin, 23 Agustus 2021	Persiapan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020
3.	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020	Rabu, 25 Agustus 2021	- Penyampaian Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 - Pembentukan Panja-Panja RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020
4.	Rapat Panja Perumus Kesimpulan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020	Rabu, 1 September 2021	Membahas/Merumuskan Kesimpulan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020
5.	Rapat Panja Draft RUU Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020	Kamis, 2 September 2021	Membahas Draft RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020
6.	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan	Senin, 6 September 2021	- Laporan dan Pengesahan hasil Panja-Panja - Pendapat Mini Sebagai Sikap Akhir Fraksi



	APBN TA 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan Naskah RUU - Pendapat Pemerintah - Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II
--	--------------	--



Gambar 13. Screenshot Output Kesimpulan Rapat Siklus Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2020

4. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Siklus Pembahasan RUU APBN TA. 2022

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Juli 2021. Badan Anggaran DPR RI melakukan pembahasan RUU APBN TA. 2022, dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1	Rapat Koordinasi Pimpinan, Tenaga Ahli dan Sekretariat Badan Anggaran DPR RI	Selasa, 24 Agustus 2021	Persiapan Pembahasan RUU APBN TA 2022
2	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA	Rabu, 25 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Pokok-pokok RUU tentang APBN TA 2022 - Pembentukan Panja-Panja dan Tim



	2022		Perumus RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020
3	Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Rabu, 8 September 2021	Membahas Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2022
4	Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Kamis, 9 September 2021	Melanjutkan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2022
5	Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Senin, 13 September 2021	Melanjutkan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2022
6	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Selasa, 14 September 2021	Penetapan Postur Sementara RUU APBN TA 2022 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan
7	Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Rabu, 15 September 2021	Membahas Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN TA 2022
8	Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Senin, 20 September 2021	Membahas Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RUU APBN TA 2022
9	Rapat Timus Asumsi Dasar, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Rabu, 22 September 2021	Penyusunan Laporan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2022
10	Rapat Timus Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Rabu, 22 September 2021	Penyusunan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN TA 2022
11	Rapat Timus Transfer ke Daerah dan Dana Desa Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan	Rabu, 22 September 2021	Penyusunan Laporan Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa

	Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022		dalam RUU APBN TA 2022
12	Rapat Panja Draft RUU APBN TA 2022 Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Kamis, 23 September 2021	Membahas Draft RUU APBN TA 2022
13	Rapat Timus Draft RUU APBN TA 2022 Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Kamis, 23 September 2021	Penyusunan Laporan Panja Draft RUU APBN TA 2022
14	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022	Selasa, 28 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan dan Pengesahan hasil Panja-Panja - Pendapat Mini Fraksi Sebagai Sikap Akhir Fraksi - Pendapat Pemerintah - Pendatangan Naskah RUU - Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II
15	Rapat Koordinasi Sekretariat Badan Anggaran DPR RI dengan Penghubung Kementerian Keuangan RI	Rabu, 29 September 2021	Rapat Koordinasi Hasil Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tk.I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022 untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tk.II



Gambar 14. Screenshot Output Laporan Pimpinan Badan Anggaran di Paripurna terkait Hasil Pembicaraan Tk.I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2022

5. Dokumen Kegiatan Badan Anggaran Lainnya.

Selain melakukan pembahasan terkait siklus APBN, Badan Anggaran juga melakukan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan Kegiatan Kunjungan Kerja, Kegiatan Badan Anggaran lainnya yang dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tema Peta Jalan Penguatan Fundamen Ekonomi Indonesia Pascapandemi Covid-19	18 Maret 2021	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR RI dengan Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. dan Dr. M. Fadhil Hasan
2	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tema Optimalisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPN dalam Rangka Memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional	25 Maret 2021	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR RI dengan Prof. Dr. A. Anshari Ritonga, S.E., S.H., M.H. dan Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M., Int Tax.
3	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tema Model Pengelolaan Subsidi yang Efektif dan Tepat Sasaran untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1 April 2021	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR RI dengan Dr. Bambang Widiyanto dan Dr. Fahmi Radhi, M.B.A.
4	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan	7 April	Rapat Dengar Pendapat

	agenda Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	2021	(RDP) Badan Anggaran DPR RI dengan Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia
5	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tema Kesiapan APBN 2022 Menuju Normalisasi Utang dan Defisit pada Tahun 2023	8 April 2021	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR RI dengan Dr. Tauhid Ahmad dan Dr. A. Prasetyantoko, S.E., M.Sc.
6	Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kantor Wilayah Bank Indonesia Bali dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Bali terkait Pelaksanaan kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022	25-27 November 2021	-
7	Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Bank Indonesia Aceh dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Aceh terkait Pelaksanaan kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022 dan Dana Outsus Aceh	01 – 03 Desember 2021	-
8	Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah terkait Pelaksanaan kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022	06 – 08 Desember 2021	-
9	Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat terkait Pelaksanaan	14 – 16 Desember 2021	



	kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022		
10	Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Bank Indonesia Kalimantan Barat dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat terkait Pelaksanaan kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022	14 – 16 Desember 2021	



Gambar 15. Screenshot Output Laporan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Badan Anggaran Tahun 2021

Dari target jumlah dokumen rapat dan tata usaha sebanyak 5 dokumen, Bagian Set. Banggar pada tahun 2021 telah dapat menyelesaikan 5 dokumen rapat dan tata usaha. Oleh karena itu capaian kinerja Bagian Set. Banggar mencapai 100%.

Capaian kinerja Bagian Set. Banggar Tahun 2021 sama dengan capaian kinerja Tahun 2020 dimana seluruh target yang akan dicapai telah dapat terpenuhi atau 100%. Hal ini terkait dengan siklus penganggaran secara nasional (APBN) yang harus diselesaikan secara tepat waktu.

Tabel 8 Akuntabilitas Kinerja Bagian Set. Banggar Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
		Bulan	Output	Capaian
Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha persidangan Badan Anggaran sesuai SOP	Jumlah dokumen Rapat dan Tata Usaha pada.			100%
	1. Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022	Mei - Juli	1. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
	2. Siklus Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA. 2021	Juli	2. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
	3. Siklus Pembahasan	Juli –	3. Dokumen	

	RUU Pertanggung jawaban Atas Pelaksanaan APBN TA. 2020	September	Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
	4. Siklus Pembahasan RUU APBN TA 2022	Agustus – September	4. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
	5. Kegiatan Badan Anggaran Lainnya	Maret – September	5. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
Jumlah			5 Dokumen	100%

Pada perencanaan kinerja yang dilakukan pada tahun 2020, *output* Bagian Set. Banggar direncanakan sebanyak 6 (enam) dokumen, namun pada tengah tahun berjalan, Bag. Set. Banggar merevisi *output* nya dari 6 dokumen menjadi 5 dokumen yaitu pada *output* Dokumen Rapat dan Tata Usaha Siklus Pembahasan APBN-P TA. 2021, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 Pemerintah tidak mengajukan APBNP kepada DPR RI, sehingga pembahasan APBNP TA. 2021 tidak dilakukan pembahasannya oleh Badan Anggaran DPR RI.

D. BAGIAN SEKRETARIAT BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Kegiatan Badan Urusan Rumah Tangga pada tahun 2021 dibagi menjadi dua kegiatan, kegiatan didalam kantor seperti kegiatan rapat-rapat dan kegiatan di luar kantor seperti kegiatan kunjungan kerja.

1. Kegiatan Rapat-Rapat

Rapat-rapat yang telah dilakukan oleh BURT pada Tahun 2021 sebanyak 79 kali, dengan perincian sebagaimana berikut:

1. Rapat Pimpinan BURT sebanyak 14 kali
2. Rapat Intern BURT sebanyak 5 kali
3. Rapat BURT sebanyak 44 kali
4. Rapat Panja sebanyak 16 kali

Adapun kegiatan/rapat-rapat tersebut sebagaimana terlihat dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9 Rekapitulasi Rapat BURT Per Masa Sidang Tahun 2021

NO	MASA SIDANG	BULAN												JUMLAH PER MASA SIDANG
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS III	9	7											16
2	MS IV			14										14
3	MS V					8	3							11
4	MS I								6	7	6			19
5	MS II											15	4	19
JUMLAH PER BULAN		9	7	14		8	3		6	7	6	15	4	79

Capaian kinerja Sekretariat BURT DPR RI pada tahun 2021, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) dokumen, selama 5 kali masa persidangan yang terdiri dari dukungan penyelenggaraan Rapat dan Administrasi, dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sehingga capaian kinerja 100% sebagaimana terlihat dalam tabel 10 berikut.



Tabel 10 Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan BURT

Masa Sidang	Jumlah Kegiatan dan Layanan Rapat dan Tata Usaha BURT
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021	1 Dokumen
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021	1 Dokumen
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021	1 Dokumen
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022	1 Dokumen
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022	1 Dokumen
Total	5 Dokumen

Capaian kinerja Sekretariat BURT DPR RI Tahun 2021 sebanding dengan Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11 Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat BURT

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
2021	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

2. Kegiatan Kunjungan Kerja

Pada tahun 2021, BURT DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka **Pengawasan**, telah dilaksanakan sebanyak 74 kali dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 12 Rekapitulasi kunker BURT dalam Negeri Per Masa Sidang Tahun 2021

NO	MASA SIDANG	BULAN												JUMLAH PER MASA SIDANG
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS III	4	2	2										8
2	MS IV			4	5	1								10
3	MS V					5	6		2					13
4	MS I								2	9	7			18
5	MS II											9	16	25
JUMLAH PER BULAN		4	2	6	5	6	6		4	9	7	9	16	74

E. BAGIAN SEKRETARIAT MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan telah memenuhi sasaran kegiatan dan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja secara tepat waktu. Sasaran Kegiatan Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan yaitu Terlaksananya dukungan rapat, tata usaha, dan administrasi perkara persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sesuai SOP. Indikator kinerja dari sasaran kegiatan tersebut yaitu jumlah Dokumen Rapat, Tata Usaha, dan Administrasi Perkara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).



Jumlah **Dokumen Rapat, Tata Usaha, dan Administrasi Perkara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)** adalah jumlah dokumen yang berupa dukungan teknis dan administrasi serta substansi dalam Persidangan/rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara yang dibuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat MKD, adapun Dokumen Persidangan/rapat yaitu dokumen yang diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan rapat-rapat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi MKD DPR RI. Adapun materi persidangan yang disiapkan oleh Bagian Sekretariat MKD adalah berupa kelengkapan penyelenggaraan rapat/sidang, yaitu jadwal acara rapat/sidang, surat undangan rapat/sidang, skenario rapat/sidang, daftar hadir rapat/sidang, rekapitulasi daftar hadir rapat/sidang, pointers rapat/sidang, dan penyiapan bahan rapat/sidang, seperti dokumen substansi rapat/sidang, draft kesimpulan rapat/sidang, dan laporan singkat. Selain itu, Bagian Sekretariat MKD juga menyiapkan laporan kunjungan kerja, baik kunjungan dalam negeri maupun luar negeri; menyiapkan laporan kinerja.

Sedangkan dokumen Tata Usaha yaitu meliputi administrasi surat-menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar, serta melakukan administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, yang meliputi: jamuan rapat; rapat di luar jam kerja; rapat konsinyering; Surat Perjalanan Dinas (SPD) kunjungan kerja; honorarium narasumber; Seminar Nasional; pencetakan dan penjilidan; revisi anggaran; dan laporan realisasi anggaran.

Terkait Administrasi Perkara, Materi atau dokumen yang dimaksud yaitu Dukungan teknis dan administratif Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan berupa: Surat undangan sidang pemanggilan pengadu; surat undangan sidang pemanggilan Teradu; surat undangan Saksil; Surat Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan; surat undangan rapat penyelidikan dan verifikasi; dan agenda rapat.

Sampai dengan akhir tahun 2021 Bagian Sekretariat MKD telah memberikan dukungan kegiatan kepada MKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU MD3, Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Adapun kegiatan dan rapat/sidang yang telah dilaksanakan oleh MKD sebanyak 57 kegiatan sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.



Tabel 13 Rekapitulasi Kegiatan dan Rapat/Sidang MKD

NO	MASA SIDANG	BULAN												JUMLAH PER MASA SIDANG	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	MS III (Rapat dan Kunker)	6	4												10
2	MS IV (Rapat, Kunker, dan Seminar)			7	3										10
3	MS V (Rapat dan Kunker)					2	5	1							8
4	MS I (Rapat dan Kunker)								4	10					14
5	MS II (Rapat, Kunker, dan Seminar)											11	7		18
JUMLAH PER BULAN		6	4	7	3	2	5	1	4	10		11	7	60	

Sumber: Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Berdasarkan kegiatan dan rapat/sidang MKD tersebut, capaian kinerja Bagian Sekretariat MKD pada Tahun 2021, yaitu tercapai sebanyak 5 dokumen selama 5 masa persidangan yang terdiri dari dukungan penyelenggaraan rapat, dukungan Tata Usaha dan Administrasi Perkara dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan rincian dokumen sebagaimana Tabel berikut;

Tabel 14 Akuntabilitas Kinerja Bagian Set. MKD Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
		Output	Jumlah Kegiatan	Target	Capaian
Terlaksananya dukungan rapat, tata usaha dan Administrasi Perkara Mahkamah Kehormatan Dewan	Jumlah dokumen Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021	Dokumen Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara	10	1 Dokumen	100%
	Jumlah dokumen Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021	Dokumen Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara	10	1 Dokumen	100%
	Jumlah dokumen Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021	Dokumen Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara	5	1 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Rapat,	Dokumen	14	1 dokumen	100%

	Tata Usaha dan Administrasi Perkara pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022	Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara			
	Jumlah dokumen Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022	Dokumen Rapat, Tata Usaha dan Administrasi Perkara	18	1 dokumen	100%
Jumlah		5 Dokumen	54	5	100%

Sumber: Bagian Sekretariat MKD DPR RI.

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Bagian Sekretariat MKD telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan perjanjian kinerja Bagian Sekretariat MKD telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 5 dokumen sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja sehingga capaian kinerjanya tercapai 100%, capaian kinerja Bagian Sekretariat MKD tahun 2021 juga sebanding dengan capaian kinerja Bagian Sekretariat MKD tahun 2020 dan tahun 2019 dimana seluruh target terpenuhi.

F. BAGIAN SEKRETARIAT PANITIA KHUSUS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berpotensi pada hasil yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Bagian Sekretariat Pansus memiliki sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha di Panitia Khusus. Lebih lanjut bahwa Bagian Sekretariat Pansus Memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

1. Jumlah materi persidangan Panitia Khusus terdiri dari 5 dokumen

Kegiatan	Target (dok.)	Realisasi (dok.)
Kegiatan yang telah dilaksanakan:		
1) MP III Tahun Sidang 2020 – 2021 (Rapat dan Kunker)	1	1
2) MP IV Tahun Sidang 2020 – 2021 (Rapat dan Kunker)	1	1
3) MP V Tahun Sidang 2020 – 2021 (Rapat dan Kunker)	1	1
4) MP I Tahun Sidang 2021 – 2022 (Rapat dan Kunker)	1	1
5) MP II Tahun Sidang 2021 – 2022 (Rapat dan Kunker)	1	1
Kegiatan yang tidak dilaksanakan:		
-	-	-
TOTAL	5	5



2. Jumlah dokumen administrasi tata usaha Panitia Khusus terdiri dari 5 Dokumen

Kegiatan	Target (dok.)	Realisasi (dok.)
Kegiatan yang telah dilaksanakan:		
1) MP III Tahun Sidang 2020 – 2021 (Rapat dan Kunker)	1	1
2) MP IV Tahun Sidang 2020 – 2021 (Rapat dan Kunker)	1	1
3) MP V Tahun Sidang 2020 – 2021 (Rapat dan Kunker)	1	1
4) MP I Tahun Sidang 2021 – 2022 (Rapat dan Kunker)	1	1
5) MP II Tahun Sidang 2021 – 2022 (Rapat dan Kunker)	1	1
Kegiatan yang tidak dilaksanakan:		
-	-	-
TOTAL	5	5

Jumlah Materi Persidangan Panitia Khusus (Pansus) adalah tersedianya dukungan materi Persidangan Panitia Khusus yang dibuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat Pansus, meliputi dokumen yang diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan rapat-rapat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Adapun materi persidangan yang disiapkan oleh Bagian Sekretariat Pansus adalah berupa kelengkapan penyelenggaraan rapat, yaitu jadwal acara rapat, skenario rapat, bahan rapat, daftar hadir rapat yang mencakup rekapitulasi daftar hadir rapat, laporan singkat, laporan kunjungan kerja baik kunjungan dalam negeri maupun luar negeri, dan laporan kinerja/kegiatan; menyiapkan laporan kinerja.

Jumlah Dokumen Administrasi tata usaha Panitia Khusus (Pansus) adalah tersedianya Dokumen administrasi tata usaha Panitia Khusus yang dibuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat Pansus, meliputi surat masuk, surat keluar, melakukan administrasi Rencana Keuangan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, yang meliputi: jamuan rapat; rapat konsinyering, Surat Perjalanan Dinas (SPD) kunjungan kerja; honorarium narasumber, pencetakan dan penjilidan, revisi anggaran, dan laporan realisasi anggaran.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Bagian Sekretariat Pansus telah memberikan dukungan kegiatan kepada Pansus dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU MD3 dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Adapun kegiatan/rapat-rapat dan Kunjungan Kerja yang telah dilaksanakan oleh Pansus sebanyak **11** kegiatan. Sebanyak **41** kali rapat (Rapat Pimpinan sebanyak 4 kali rapat; Rapat Intern sebanyak 6 kali rapat; Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 10 kali rapat; Rapat Panja sebanyak 4 kali rapat; Rapat Kerja sebanyak 17 kali rapat; Rapat Kecil sebanyak 1 kali rapat) dan **11** kali Kunjungan Kerja Dalam sebagaimana terlihat dalam Tabel 14 berikut.

Tabel 15 Rekapitulasi Rapat Pansus

NO	MASA SIDANG	BULAN												JUMLAH PER MASA SIDANG
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS III	1												1
2	MS IV			5	1	3								9
3	MS V					2	16	7						25
4	MS I								3	3				6
5	MS II													0
JUMLAH PER BULAN		1		5	1	5	16	7	3	3				41

Sumber: Bagian Sekretariat Pansus DPR RI.

Berdasarkan kegiatan rapat-rapat Pansus tersebut, capaian kinerja Bagian Sekretariat Pansus pada Tahun 2021, yaitu tercapai sebanyak 5 Dokumen Persidangan selama 5 masa persidangan yang terdiri dari dukungan **Materi Persidangan Panitia Khusus dan Dokumen Administrasi tata usaha Panitia Khusus** telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan rincian dokumen sebagaimana terlihat dalam Tabel 16 sebagai berikut.

Tabel 16 Rekapitulasi Materi Persidangan Pansus dan Dokumen Administrasi tata usaha Panitia Khusus

Kegiatan	Jumlah Rapat	Target (dok.)	Realisasi (dok.)	Capaian	
				Kuantitatif	Kualitatif
Kegiatan yang telah dilaksanakan:					
1) MP III (Rapat dan Kunker)	10	1	1	100%	100%
2) MP IV (Rapat dan Kunker)	3	1	1	100%	100%
3) MP V (Rapat dan Kunker)	11	1	1	100%	100%
4) MP I (Rapat dan Kunker)	21	1	1	100%	100%
5) MP II (Rapat dan Kunker)	-	1	1	100%	100%
Kegiatan yang tidak dilaksanakan:					
-	-	-	-	-	-
TOTAL	45	5	5	100%	100%

Sumber: Bagian Sekretariat Pansus DPR RI.

Berdasarkan Tabel 16 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Bagian Sekretariat Pansus telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan perjanjian kinerja Bagian Sekretariat Pansus telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 5 dokumen sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja sehingga capaian kerjanya tercapai 100%, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Selain itu, capaian kinerja Bagian Sekretariat Pansus tahun 2021 juga sebanding dengan capaian kinerja Bagian Sekretariat Pansus tahun 2016 tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam Tabel 17 berikut.



Tabel 17 Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat Pansus

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	
			Kuantitatif	Kualitatif
2016	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%
2017	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%
2018	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%
2019	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%
2020	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%

Berdasarkan Tabel 17 tersebut terlihat bahwa capaian kinerja dari Bagian Sekretariat Pansus, baik pada Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 Tahun 2019 maupun Tahun 2020 secara kuantitatif dan kualitatif tetap tercapai 100% karena jumlah materi persidangan yang dibuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat Pansus telah seluruhnya digunakan oleh Pansus DPR RI.

Selama tahun 2021 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Sekretariat Pansus telah melaksanakan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, capaian kinerja Bagian Sekretariat Pansus dapat dikatakan telah tercapai 100%, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
				Kuantitatif	Kualitatif
Tersedianya Dokumen Persidangan Pansus	Jumlah Materi Panitia Khusus	5 dok	5 dok	100%	100%

Demikian Laporan Kinerja Bagian Sekretariat Pansus mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Khusus berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagaimana diamankan oleh peraturan undang-undang yang berlaku. Semoga ke depan, kinerja Bagian Sekretariat Pansus menjadi lebih baik, baik dari segi pencapaian kerjanya maupun pelaporan kerjanya.

G. BAGIAN SEKRETARIAT BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Bagian Sekretariat BAKN telah menyelesaikan keseluruhan target tersebut secara tepat waktu. Adapun dokumen yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Desember 2020, BAKN DPR RI melakukan kegiatan sebagai berikut :

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1	Rapat Pimpinan BAKN DPR RI	13 Januari 2021	Pembahasan Rancangan Jadwal Kegiatan BAKN pada MS. III TS. 2020-2021
2	Rapat Pimpinan BAKN DPR RI	21 Januari 2021	Pembahasan Penelaahan BAKN terhadap LHP BPK RI terkait PT. Patra Jasa
3	Rapat Intern BAKN DPR RI	21 Januari 2021	Pembahasan Penelaahan BAKN terhadap LHP BPK RI terkait PT. Patra Jasa
4	Rapat Dengar Pendapat dengan BPKP dan PLN	21 Januari 2021	Pembahasan penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait kebijakan pengelolaan subsidi energi
5	Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN	28 Januari 2021	Pembahasan penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait kebijakan pengelolaan subsidi energi
6	Rapat Konsultasi dengan BPK RI	4 Februari 2021	Pembahasan penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait kebijakan pengelolaan subsidi energi

2. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 19 Januari 2021, BAKN DPR RI melakukan kegiatan sebagai berikut :

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1.	Rapat Pimpinan BAKN DPR RI	08 Maret 2021	<p>Pembahasan Rapat Penetapan Wakil Ketua BAKN DPR RI periode 2019 – 2024 yaitu Saudara Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si (A-423/Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)</p> <p>Usulan Pemilihan Tema Baru (tematik) Dana Alokasi Khusus (DAK) telaahan BAKN DPR RI.</p> <p>Penandatanganan laporan telaah BAKN DPR RI terkait BPOM dan PT. Patra Jasa.</p> <p>Finalisasi laporan telaahan BAKN DPR RI terkait Kebijakan Subsidi Energi.</p>



No	Rapat	Tanggal	Keterangan
			Usulan Kunjungan BAKN ke Luar Negeri (Irelandia, Ethiopia, Maroko) Rancangan jadwal kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
2	Rapat Intern BAKN DPR RI	08 Maret 2021	Pembahasan Rapat Penetapan Wakil Ketua BAKN DPR RI periode 2019 – 2024 yaitu Saudara Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si (A-423/F-PKS) Usulan Pemilihan Tema Baru (tematik) Dana Alokasi Khusus (DAK) telaahan BAKN DPR RI. Penandatanganan laporan telaah BAKN DPR RI terkait BPOM dan PT. Patra Jasa. Finalisasi laporan telaahan BAKN DPR RI terkait Kebijakan Subsidi Energi. Usulan Kunjungan BAKN ke Luar Negeri (Irelandia, Ethiopia, Maroko) Rancangan jadwal kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

3. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 April 2021, BAKN DPR RI melakukan kegiatan sebagai berikut :

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1	Rapat Pimpinan BAKN DPR RI	06 Mei 2021	Pembahasan rancangan jadwal kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021. Rencana Kunjungan ke Luar Negeri
2	Rapat Intern BAKN DPR RI	06 Mei 2021	Pembahasan rancangan jadwal kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021. Rencana Kunjungan ke Luar Negeri
3	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Lembaga Penelitian SMERU (<i>Social Monitoring and Early Response Unit</i>), KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) dan INDEF	27 Mei 2021	Pembahasan mendapatkan masukan terkait penelaahan BAKN DPR RI atas LHP BPK RI terhadap Dana Alokasi Khusus

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
	<i>(Institute for Development of Economics and Finance)</i>		
4	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar Energi (DR. Rudi Rubiandini)	2 Juni 2021	Pembahasan mendapatkan masukan terkait penelaahan BAKN DPR RI terkait kebijakan subsidi energi
5	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia	17 Juni 2021	Pembahasan terkait penelaahan BAKN DPR RI atas LHP BPK RI terhadap Dana Alokasi Khusus
6	Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PLN	2 Juni 2021	Pembahasan terkait penelaahan BAKN DPR RI terkait kebijakan subsidi energi
7	Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Anggaran & Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI	3 Juni 2021	Pembahasan terkait penelaahan BAKN DPR RI terkait Dana Alokasi Khusus
8	Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional BAPPENAS	3 Juni 2021	Pembahasan terkait penelaahan BAKN DPR RI terkait Dana Alokasi Khusus
9	Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	3 Juni 2021	Pembahasan terkait penelaahan BAKN DPR RI terkait Subsidi Energi
10	Rapat Dengar Pendapat dengan BPKP RI	1 Juli 2021	Pembahasan terkait penelaahan BAKN DPR RI terkait Dana Alokasi Khusus

4. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Juli 2021, BAKN DPR RI melakukan kegiatan sebagai berikut :

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1	Rapat Pimpinan BAKN DPR RI	16 Agustus 2021	Pembahasan rancangan jadwal kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022



2	Rapat Intern BAKN DPR RI	16 Agustus 2021	Pembahasan rancangan jadwal kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022
3	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	25 Agustus 2021	Pembahasan penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait Dana Alokasi Khusus.
4	Rapat Dengar Pendapat dengan BPKP RI	4 Oktober 2021	Pembahasan penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional
5	Rapat Kerja dengan Mendagri RI, Menkeu & Bappenas	01 September 2021	Pembahasan penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait Dana Alokasi Khusus

5. Dokumen Rapat dan Tata Usaha Tahun Sidang 2021-2022 Masa Persidangan II

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Juli 2021, BAKN DPR RI melakukan kegiatan sebagai berikut :

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
1	Rapat Pimpinan BAKN DPR RI	1 November 2021	Pembahasan Rancangan jadwal kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022; Pembahasan surat penugasan dari Korekku yaitu penugasan telaahan LHP BPK terkait PT. Aneka Tambang Tbk dan Anak Perusahaan; Pembahasan rencana kunjungan ke Swedia, dimana sudah mendapatkan respon dari Parlemen Swedia yaitu di awal Februari 2022 Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 dan kunker negara kedua untuk tahun 2022;
2	Rapat Intern BAKN DPR RI	1 November 2021	Pembahasan Rancangan jadwal kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022; Pembahasan surat penugasan dari Korekku yaitu penugasan telaahan LHP BPK terkait PT. Aneka Tambang Tbk dan Anak Perusahaan; Pembahasan rencana kunjungan ke Swedia, dimana sudah mendapatkan respon dari Parlemen Swedia yaitu di awal Februari 2022 Masa Sidang III Tahun

No	Rapat	Tanggal	Keterangan
			Sidang 2021-2022 dan kunker negara kedua untuk tahun 2022;
3	Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen dan Dirjen Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK	16 November 2021	Pembahasan penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.

Dari target jumlah dokumen rapat dan tata usaha sebanyak 5 dokumen, Bagian Set. BAKN pada tahun 2021 telah dapat menyelesaikan 5 dokumen rapat dan tata usaha. Oleh karena itu capaian kinerja Bagian Set. BAKN mencapai 100%.

Capaian kinerja Bagian Set. BAKN Tahun 2021 sama dengan capaian kinerja Tahun 2020 dimana seluruh target yang akan dicapai telah dapat terpenuhi atau 100%.

Tabel 18 Akuntabilitas Kinerja Bagian Set. BAKN Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
		Bulan	Output	Capaian
Terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	Jumlah dokumen Rapat dan Tata Usaha pada.			100%
	1. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021	Januari – Februari	1. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
	2. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021	Maret – Mei	2. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
	3. Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021	Mei – Agustus	3. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
	4. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022	Agustus – Oktober	4. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha	
5. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022	November–Desember	5. Dokumen Kesimpulan Rapat dan Tata Usaha		
Jumlah			5 Dokumen	100%



BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2021, Biro Persidangan II telah berhasil melaksanakan seluruh target indikator kinerja dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Keberhasilan Biro Persidangan II untuk pelaksanaan realisasi anggaran sebesar 93,51% merupakan hasil dari kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Biro Persidangan II. Sasaran kinerja Biro Persidangan II pada tahun 2021 adalah peningkatan kualitas dukungan Persidangan Badan dan Mahkamah dan Panitia Khusus, dengan beberapa indikator yaitu persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI yang capaiannya sebesar 100%; Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan yang capaiannya sampai bulan Januari 2022 ini belum selesai pelaksanaan survei nya sehingga besaran indeks layanan kepuasan belum dapat diketahui; dan persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II yang capaiannya sebesar 100%.

Dari sisi output, pada tahun 2021 Biro Persidangan II telah berhasil menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan memperhatikan langkah-langkah strategis yang diperkirakan dapat membuat proses kerja lebih efisien dan efektif. Biro Persidangan II juga telah berhasil mengeluarkan berbagai kebijakan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, pada Desember 2021, Biro Persidangan II berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pencapaian output ini dijabarkan lebih rinci pada Laporan Kinerja Biro Persidangan II.

B. SARAN

Berdasarkan capaian Biro Persidangan II, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan, antara lain:

- a. Meningkatkan rapat-rapat, baik dengan Pimpinan Setjen DPR, unit kerja terkait maupun dengan jajaran di lingkungan Biro Persidangan II secara intens agar tercipta koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan konfirmasi demi pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pegawai di lingkungan Biro Persidangan II untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang profesional terkait dengan dukungan pelayanan persidangan, sehingga dukungan kepada DPR RI menjadi lebih optimal, profesional, dan akuntabel.
- c. Membangun aplikasi laporan kinerja yang terintegrasi, baik terkait capaian kinerja *output/outcome* maupun capaian kinerja anggarannya





sehingga akan memudahkan melakukan pemantauan kinerja dan pengumpulan data kinerja secara cepat, tepat, dan akurat.

- d. Meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas guna mempertahankan predikat unit WBK.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana unit kerja di lingkungan Biro Persidangan II.
- f. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi atas perjanjian kinerja Biro Persidangan II yang telah ditetapkan, secara berjenjang dan periodik, per bulan atau per triwulan.